

**INTERAKSI DAN ASIMILISI MASYARAKAT KETURUNAN  
TIONGHOA DENGAN MASYARAKAT PRIBUMI  
(Studi pada Masyarakat Keturunan Tionghoa di Kelurahan Tanjungkarang  
Pusat Bandar Lampung)**

**Suwarno<sup>1</sup>, Abdulsyani<sup>2</sup>, Damar Wibisono<sup>3</sup>, Pairulsyah<sup>4</sup>**

<sup>1)</sup> *Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

<sup>2)</sup> *Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

<sup>3)</sup> *Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

<sup>4)</sup> *Jurusan Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Lampung*

---

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian ini adalah: (1) untuk mengetahui tingkat intensitas interaksi sosial masyarakat keturunan Tionghoa; (3) Untuk mengetahui sikap dan perilaku masyarakat keturunan Tionghoa terhadap proses asimilasi dengan masyarakat pribumi. Berdasarkan hasil penelitian ini diketahui bahwa intensitas interaksi sosial masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat pribumi berada pada tingkatan yang sedang-sedang saja. Hal ini ditunjukkan dengan hubungan interaksi sosial yang terjadi hanya berdasarkan kepentingan bisnis dan di dalam pergaulan sehari-hari menempatkan masyarakat pribumi lebih rendah dibandingkan dengan masyarakat keturunan Tionghoa. Begitu pula dengan perilaku asimilasi, terdapat kecenderungan bahwa proses ini belum dapat berjalan maksimal dan masih berada pada taraf yang rendah. Gejala ini ditunjukkan dengan tidak ditemukannya amalgamasi dalam keluarga keturunan Tionghoa serta akulturasi yang masih sangat rendah.

**Kata Kunci: Interaksi, Asimilasi, Masyarakat Tionghoa, Masyarakat Pribumi**

**ABSTRACT**

The objectives of this study were: (1) to determine the intensity level of social interaction among Chinese descendants; (3) This is to determine the attitudes and behavior of people of Chinese descent towards the assimilation process with the indigenous community. Based on the results of this study, it is known that the intensity of social interaction between Chinese descendants and indigenous people is at a moderate level. This is indicated by the social interaction that occurs only based on business interests and in daily relationships places the indigenous people lower than those of Chinese descent. Likewise with assimilation behavior, there is a tendency that this process has not been able to run optimally and is still at a low level. This symptom is indicated by the absence of amalgamation in families of Chinese descent and the still very low acculturation.

**Keywords: Interaction, Assimilation, Chinese Society, Indigenous People**

**PENDAHULUAN**

Pada hakekatnya kemajemukan bangsa Indonesia merupakan aset nasional yang kaya akan khasanah kebudayaan bangsa. Dari begitu banyak ragam kebudayaan daerah yang dimiliki oleh masing-masing suku bangsa yang ada, memiliki perbedaan dan ciri yang khas. Selain suku bangsa Indonesia Asli, di Indonesia juga terdapat suku bangsa asing yang anggotanya sebagian sudah

menjadi warga negara Indonesia. Mereka banyak yang berasal dari etnis Tionghoa, Arab, India, Pakistan dan lain sebagainya. Akan tetapi persoalan yang sering muncul kepermukaan adalah timbulnya suatu gejala yang kurang serasi dan harmonis kontak sosial antara masyarakat pribumi dengan masyarakat keturunan khususnya dengan masyarakat etnis Tionghoa yang merupakan etnis asing mayoritas. Hal ini sejalan dengan pendapat Nasikun (1984) bahwa suatu masyarakat adalah bersifat majemuk sejauh masyarakat tersebut secara struktural memiliki sub-sub kebudayaan yang bersifat diverse. Masyarakat demikian ditandai oleh kurang berkembangnya sistem nilai atau konsensus yang disepakati oleh seluruh anggota masyarakat.

Oleh karena itu dalam realitanya, kendatipun masyarakat Indonesia bersatu dalam ke-Bhineka Tunggal Ika-an dan telah menerima Pancasila sebagai azas tunggal, memiliki simbol-simbol positif berupa Sumpah Pemuda, Lagu dan Bendera Kebangsaan serta UUD 1945, akan tetapi dalam proses sosialnya masih tetap terasa akan adanya konflik-konflik yang terjadi, walaupun dalam kualitas dan kuantitas yang kecil (Nasikun, 1984: 4-8). Selanjutnya dinyatakan bahwa potensi disintegrasi yang dimiliki oleh Bangsa Indonesia juga relatif besar. Kekhawatiran tersebut terutama dikarenakan oleh keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia, dan diantara keanekaragaman tersebut kurang terjalin suasana interaksi yang hangat dan harmonis antar suku-suku di dalamnya.

Menurut Koentjaraningrat (1982: 345), salah satu permasalahan integrasi dalam usaha mempersatukan masyarakat adalah masalah hubungan antara masyarakat pribumi (masyarakat mayoritas) dengan masyarakat keturunan (masyarakat minoritas). Dalam hal ini terlihat adanya pengaruh stereotipe etnis yaitu berupa penggambaran subjektif terhadap ciri-ciri suatu bangsa lain secara khusus, sehingga dapat menghalangi atau minimal menghambat terjadinya pola interaksi dan pembauran dalam masyarakat.

Dalam kaitannya dengan penelitian ini, maka untuk lebih objektif menelaah hubungan antara masyarakat pribumi dengan masyarakat keturunan Tionghoa, ada baiknya terlebih dahulu melihat latar belakang historis masuknya masyarakat Tiongho ke Indonesia. Sejarah pertama dimulainya hubungan bangsa Indonesia dengan bangsa Tiongkok yaitu sejak orang yang bernama Fa-Hien

singgah di pulau Jawa dalam perjalanannya menuju India. Pada saat pemerintahan Tiongkok berada di bawah pimpinan Dinasty Ching, banyak pula para pedagang Tiongkok yang menetap sehingga menguasai rute-rute perjalanan di Asia Tenggara termasuk di Indonesia, (Hidayat Z.M., 1984: 155). Setelah menetap dan mengadakan akulturasi dengan kebudayaan setempat maka dapat dijabarkan bahwa saat ini secara garis besar masyarakat Indonesia keturunan Tionghoa ini terbagi atas dua golongan, yaitu: *golongan pertama* golongan totok yaitu termasuk golongan yang berasal dari kaum imigran pada awal abad ke-20 yang pada umumnya belum berakulturasi dan dalam berkomunikasi masih menggunakan bahasa Tionghoa dengan orientasi ke tanah leluhurnya masih sangat kuat. Sedangkan *golongan kedua*, adalah golongan peranakan yaitu masyarakat peranakan yang telah lahir dan besar di Indonesia, orientasi mereka ke tanah leluhur hampir memudar karena telah menerima pengaruh kebudayaan pribumi dalam kehidupan sehari-hari dan mereka dominan beragama Kristen.

Dalam perjalanan kehidupan etnis Tiongkok di Indonesia pada masa-masa selanjutnya, golongan ini kemudian ditempatkan sebagai golongan masyarakat yang memiliki kedudukan lebih tinggi dari masyarakat pribumi menurut hukum kolonial Belanda. Kondisi seperti ini tentu memiliki dampak terhadap proses interaksi yang terjadi antara kedua golongan tersebut. Selain itu terdapat pula fakta yang menunjukkan pernah terbentuknya tentara golongan Tiongkok anti Indonesia yang bernama Po An Tui.

Latar belakang sejarah di atas tentunya bisa mempengaruhi persepsi masyarakat pribumi ketika memandang keberadaan masyarakat Tionghoa saat ini dan dalam memberikan tanggapan terhadap proses pembauran. Fakta sejarah tersebut kemungkinan juga memberi sumbangan penting terhadap pembentukan prasangka dan stereotip negatif dari masyarakat pribumi untuk berinteraksi dengan golongan masyarakat keturunan Tionghoa. Menurut Frans Seda, dalam perkembangannya golongan masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia secara umum terlihat dengan menguatnya dominasi mereka dalam bidang perekonomian yang lebih disebabkan oleh adanya proteksi yang berlebihan dari pemerintahan diawal orde baru, selain memang sifat asal tanah leluhur yang ulet dan tekun bekerja. Sementara golongan masyarakat pribumi jauh tertinggal, hal ini lebih

disebabkan tipe masyarakat Indonesia yang hipokrit, malas dan cepat putus asa (Prisma No. 8/1976: 60). Kondisi ini dapat menjadikan adanya jarak berupa kesenjangan sosial ekonomi yang cukup tajam, sehingga sangat memungkinkan potensi konflik status dan rasial makin berkembang.

Pengaruh dominasi pada bidang perekonomian, jasa dan perdagangan menyebabkan golongan masyarakat Tiongkok hidup dalam suatu tingkatan yang relatif lebih baik dari segi pendapatan, pendidikan dan taraf hidup dibandingkan dengan masyarakat pribumi. Ketidak seimbangan pada sektor ekonomi, rumah tempat tinggal yang menutup diri dan kawasan pemukiman atau pecinan yang tersegregasi dan terpusat akan menyebabkan masing-masing pihak terpisah dalam lingkungan yang berbeda, dan hal ini akan menimbulkan eksklusivisme, (Hidayat Z.M., 1984: 8).

Selain dalam masalah perekonomian, rendahnya interaksi sosial dalam bermasyarakat, keengganan ikut berorganisasi seperti organisasi: PKK, Karang Taruna, Posyandu, partisipasi aktif dalam siskamling dan gotong royong (jika pun ada hanya sebatas pada bantuan materi) dan kehidupan yang terpisah, memungkinkan terjadinya pemeliharaan dan pengembangan nilai-nilai dan norma-norma mereka sendiri yang berbeda dengan norma yang berlaku umum, kondisi yang berlarut ini akhirnya dapat menimbulkan disintegrasi seperti yang terjadi pada tahun 1918 di Kudus berupa huru hara anti Cina (Leo Suryadinata, 1976: 8), dan konflik terbuka yang terjadi pada peristiwa tanggal 10 Mei 1963 di Sukabumi 1995, dan kerusuhan rasial di Pasuruan, Purwakarta, (Suara Pembaharuan, 5 November 1995).

Konsep integrasi yang dilakukan melalui pembauran dan asimilasi dirasakan sangat tepat karena dapat lebih meleburkan jati diri masing-masing serta akhirnya dapat lebih mengidentifikasi ke Indonesiaannya. Secara sederhana dasar dari persoalan integrasi adalah adanya konsensus tentang “*agreement on opinion or values*” yaitu kesepakatan akan pandangan dan nilai-nilai (Susanto, 1995: 107).

Proses asimilasi merupakan tahap perkembangan yang akan meminta sedikit banyak pengorbanan identitas dan loyalitas dari individu atau kelompok, pengorbanan itu dapat berupa kehilangan, artinya apabila kelompok etnis

Tionghoa menerima maka mereka harus mau meninggalkan ciri-ciri ke-Tionghoannya. Hal ini seperti yang terdapat dalam Piagam Asimilasi yang merupakan hasil Seminar Kesadaran Nasional di Bandung pada tanggal 15 Januari 1961 tentang Asimilasi Kebudayaan yang menegaskan adanya harapan agar ciri-ciri kultural “ke-Tinghoa-an” diganti. Seperti penggunaan nama-nama Indonesia untuk WNI keturunan walaupun ada anggapan itu dapat digunakan untuk mengelabui, akan tetapi jika sudah merupakan keharusan Undang-Undang, maka tuduhan seperti itu akan hilang dengan sendirinya, (Yahya, 1983: 13-27). Akan tetapi perlu digaris bawahi, bahwa para WNI keturunan yang telah berganti nama Indonesia bukan berarti orang tersebut telah berbaur dan terintegrasi, karena pergantian nama itu harus diikuti dengan perubahan sikap, perilaku dan orientasi, sehingga pembauran tersebut bukan hanya sekedar syarat berganti nama ke-Indonesia-an.

Beranjak dari ungkapan yang mengatakan bahwa keberhasilan integrasi atau asimilasi harus datang dari kedua belah pihak, yakni kesediaan masyarakat keturunan Tionghoa untuk menyatukan diri dengan mayoritas, dan kesediaan dari pihak pribumi untuk menerimanya. Dengan demikian untuk mewujudkan integrasi nasional yang mantap hal-hal tersebut hendaknya secara berangsur-angsur dapat diminimalisir. Itulah sebabnya maka penelitian ini perlu dilakukan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Konsep Interaksi**

Interaksi mengandung pengertian tentang kontak secara timbal balik atau inter-stimulasi dan respon antara individu dengan individu dan individu dengan kelompok. Menurut H. Bonner (dikutip dalam Gerungan. 1980: 61), interaksi sosial adalah hubungan antar dua orang atau lebih individu manusia, dimana kelakuan individu yang satu mempengaruhi, mengubah atau memperbaiki kelakuan individu lainnya atau terjadi sebaliknya. Alvin dan Helen Gouldner (dikutip dalam Gerungan. 1980: 62), menjelaskan bahwa interaksi adalah suatu aksi dan reaksi diantara orang-orang. Dengan demikian terjadinya interaksi apabila suatu individu berbuat sedemikian rupa sehingga menimbulkan reaksi dari individu-individu lainnya. Bentuk bentuk interaksi antar manusia tersebut memberikan alternatif-alternatif yang dapat digolongkan menjadi empat bentuk

utama yaitu kerjasama, persaingan, pertentangan dan akomodasi (Soekanto, 1987: 58).

Uraian di atas menunjukkan bahwa interaksi sosial pada intinya mengandung makna yang tidak jauh berbeda dengan tujuan integrasi sosial yang mendasarkan pada dua syarat terjadinya interaksi sosial yaitu adanya kontak sosial dan komunikasi, artinya kontak sosial merupakan aksi dari individu atau kelompok yang bermakna bagi aktornya, yang kemudian ditangkap oleh individu atau kelompok lainnya. Penangkapan makna tersebut menjadi pangkal tolak untuk memberikan reaksi dan sikap, (Taneko, 1984: 111). Reaksi yang muncul dari individu atau kelompok tersebut dapat berupa kontak sosial dengan tiga macam hubungan, yaitu dengan panca indera, emosi dan dengan sentimen, (Hasan Shadily, 1983: 85). Sedangkan komunikasi adalah kegiatan pengoperan unsur komunikator dan komunikan, proses komunikasi dapat berjalan serasi apabila semua pihak yang terkait memberi makna dan arti yang sama terhadap lambang yang dipergunakan, (Rahmat, 1985: 113).

### **Konsep Asimilasi**

Asimilasi adalah suatu proses sosial dalam taraf kelanjutan yang ditandai dengan adanya usaha-usaha mengurangi perbedaan yang terdapat antara orang atau kelompok manusia dan juga meliputi usaha-usaha untuk mempertinggi kesatuan tindakan, sikap dan proses mental dengan memperhatikan kepentingan-kepentingan dan tujuan-tujuan bersama, (Soekanto, 1986: 68).

Milton Gordon (dikutip dalam Majalah Ilmu dan Budaya, 1990: 615), merinci konsep asimilasi sebagai proses sosial yang menyangkut baik kelompok mayoritas dan minoritas dalam tujuh macam yang berkaitan antara satu sama lainnya, sebagai berikut:

- a. Asimilasi kebudayaan (akulturasi) yang berkaitan dengan perubahan pola-pola kebudayaan guna penyesuaian diri dalam kelompok mayoritas;
- b. Asimilasi struktural yang berkaitan dengan masuknya golongan minoritas secara besar-besaran dalam kelompok, perkumpulan dan pranata pada tingkat kelompok primer golongan mayoritas;
- c. Asimilasi perkawinan (amalgamasi) yang berkaitan dengan perkawinan antar golongan secara besar-besaran;

- d. Asimilasi sikap berkaitan dengan tidak adanya prasangka dan stereotip;
- e. Asimilasi identifikasi berkaitan dengan perasaan *nation* berdasarkan mayoritas;
- f. Asimilasi perilaku berkaitan dengan tidak adanya diskriminasi;
- g. Asimilasi civic berkaitan dengan tidak adanya konflik nilai dan kekuasaan.

## **METODE**

Tipe penelitian ini adalah deskriptif kuantitatif yang bersifat menggambarkan dan menuturkan, serta mengklasifikasikan dan menganalisis, dengan menggunakan metode survei terhadap fenomena sosial tertentu. Adapun tipe ini dipergunakan dengan tujuan untuk:

- a. Mengetahui perkembangan sarana fisik tertentu atau frekuensi terjadinya suatu aspek fenomena sosial tertentu; dan
- b. Mendeskripsikan secara terperinci fenomena sosial tertentu.

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh masyarakat keturunan Tionghoa yang berada di Kelurahan Tanjungkarang Pusat khususnya yang berusia antara 20 tahun sampai dengan 50 tahun, dengan mengesampingkan status dalam keluarga dan dianggap telah mampu memberikan pendapatnya sendiri. Berdasarkan data yang ada, populasi adalah berjumlah 655 jiwa yang tersebar di 4 lingkungan. Sementara itu sampel dalam penelitian ini adalah sebesar 10% dari seluruh populasi yaitu sejumlah 65 jiwa. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan cara: kuesioner, wawancara, dan observasi.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Interaksi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi**

Interaksi dapat diartikan hubungan dinamis antarindividu maupun antarindividu dengan kelompok, dalam hubungan tersebut kemudian terjadi hubungan saling mempengaruhi antara masing-masing pihak yang terlibat. Dalam penelitian ini kajian interaksi diukur melalui intensitas berinteraksi, tujuan berinteraksi, komposisi teman sepergaulan, kesempatan berinteraksi dan media berinteraksi.

Kecenderungan yang ditampilkan oleh perilaku responden dalam berinteraksi memperlihatkan bahwa sedikit banyak interaksi sudah dilakukan oleh

responden, meskipun dalam jarak yang kurang dekat atau akrab.. Kesempatan berinteraksi biasanya dilakukan oleh responden disela-sela kesibukan bekerja, dan untuk lebih jelasnya, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Tanggapan Responden terhadap Kesempatan Berinteraksi atau Berhubungan dengan Masyarakat Pribumi

No	Tanggapan responden	Frekuensi	%
1	Sempat	16	24,61
2	Kadang-kadang	41	63,08
3	Tidak sempat	8	12,31
Jumlah		65	100,00

Sumber: Data lapangan

Berdasarkan tabel di atas, terlihat bahwa sebagian besar responden (63,08%) hanya memiliki waktu atau kesempatan yang kadang-kadang saja untuk berinteraksi secara langsung dengan masyarakat pribumi, dan hanya sebagian kecil saja yang menyatakan selalu sempat atau sengaja menyempatkan diri untuk berinteraksi, bahkan ada sekitar 12,31% responden yang menyatakan tidak sempat sama sekali.

Sebaran data di atas menunjukkan bahwa kesibukan berdagang telah menyita sebagian besar waktu responden dalam satu kehidupan bermasyarakat. Kesibukan tersebut pada akhirnya dapat mencabut akar dari fungsi interaksi itu sendiri. Padahal dengan semakin banyaknya intensitas interaksi dengan kualitas yang baik berdampak positif pada jalannya pemahaman terhadap proses integrasi. Sebagian responden dalam memenuhi kebutuhan sosial akan rasa aman, tenang, bersaudara dan adanya rasa empati secara alami akan sulit mereka dapatkan, mereka dapat saja membayar satpam atau centeng untuk menjaga rumah atau dirinya, namun rasa aman yang sebenarnya tidak mereka dapatkan.

Sementara itu mengenai tujuan mereka melakukan kontak sosial dengan masyarakat pribumi, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2. Tujuan Responden Melakukan Kontak Sosial dengan Masyarakat Pribumi

No	Tujuan responden	Frekuensi	%
1	Mencari teman dan kerjasama	20	30,77
2	Untuk kepentingan pribadi	4	6,15
3	Kepentingan ekonomi/bisnis	41	63,08
Jumlah		65	100,00

Sumber: Data lapangan



Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden (63,08%), menyatakan tujuan mereka melakukan kontak sosial dengan masyarakat pribumi adalah untuk kepentingan ekonomi atau bisnis, terutama dengan menjadikan masyarakat pribumi sebagai konsumen dari bisnis mereka. Selain itu kepentingan tersebut berupa upaya memenuhi akan kebutuhan pekerja, serta kebutuhan akan sosok yang dapat melindungi mereka ketika melakukan aktivitasnya. Perlindungan tersebut dapat dilakukan secara fisik atau melalui pengaruh yang dimiliki oleh golongan masyarakat pribadi yang bersangkutan. Sedangkan lainnya sebanyak 30,77% responden menyatakan tujuan melakukan kontak sosial dengan masyarakat pribumi adalah dalam rangka mencari teman untuk bekerjasama. Hal ini disebabkan antara lain karena responden menganggap adanya sebagian masyarakat pribumi yang dapat diajak bekerja sama, dan sisanya hanya sebagian kecil saja yaitu sekitar 6,15% yang menyatakan tujuan mereka adalah untuk kepentingan secara pribadi terutama untuk menjadi teman yang baik.

Para pejabat atau pemimpin formal sebagai pemegang keputusan yang dianggap bisa menjamin diberikannya kemudahan-kemudahan, bagi masyarakat keturunan Tionghoa merupakan salah satu sosok individu yang dapat dijadikan teman. Selain itu orang pribumi lain yang dianggap mempunyai pengaruh besar dilingkungan sekitarnya secara formal/non formal, juga mereka inginkan untuk bisa dijadikan teman, sehingga akan mengamankan jalannya usaha mereka. Tabel berikut memperlihatkan gambaran adanya teman pergaulan dari kalangan pejabat atau pemimpin di kalangan non formal yaitu:

Tabel 3. Tanggapan Responden tentang Pemilikan Teman Pergaulan dari Kalangan Pejabat dan Pemimpin Non Formal

No	Tanggapan responden	Frekuensi	%
1	Mempunyai	62	95,38
2	Tidak mempunyai	3	4,62
Jumlah		65	100,00

Sumber: Data lapangan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa pada umumnya responden menyatakan memiliki teman yang berasal dari pejabat atau pemimpin non formal. Adapun alasan mereka karena para pejabat formal maupun pemimpin non formal bisa memberikan perlindungan terhadap keamanan dan kelangsungan aktivitas

ekonomi mereka. Disamping itu alasan mereka adalah orientasi vertikal dalam memandang hubungan antara sesama manusia yang melekat pada diri responden sebagai masyarakat keturunan Tionghoa. Menurut Koentjaraningrat (1983: 62), bagi mereka yang memiliki orientasi vertikal maka hubungan yang muncul adalah anggapan pejabat atau atasan adalah sangat menentukan jalan hidup dan tujuan yang hendak dicapainya.

Upaya untuk melakukan interaksi dan kontak sosial yang mereka pilih sebagai teman biasanya tergantung tingkat kebutuhan yang mereka tetapkan sebagai ukuran. Akan tetapi pada dasarnya mereka selalu menjaga intensitas dalam berhubungan dengan masyarakat pribumi dalam kapasitasnya sebagai pejabat/pemimpin non formal tadi. Berikut ini disajikan tabel yang berkaitan dengan kesempatan yang dimiliki responden dalam berhubungan dengan masyarakat pribumi yang menduduki jabatan-jabatan tertentu.

Tabel 4. Kesempatan Responden untuk Melakukan Interaksi atau Kontak Sosial dengan Masyarakat Pribumi yang Menduduki Jabatan Tertentu

No	Kesempatan responden	Frekuensi	%
1	Pada acara resepsi keluarga masyarakat pribumi	11	16,92
2	Pada waktu hari raya keagamaan nasional	29	44,61
3	Membuat janji-janji khusus	25	38,46
Jumlah		65	100,00

Sumber: Data lapangan

Berdasarkan tabel di atas, sebanyak 44,61% responden menyatakan berhubungan dengan masyarakat pribumi yang menduduki jabatan tertentu umumnya dilakukan pada saat ada acara hari raya keagamaan nasional. Sedangkan lainnya 38,46% menyatakan dengan membuat janji terlebih dahulu dan selebihnya 16,92% menyatakan pada saat acara resepsi keluarga seperti perkawinan, khitanan atau resepsi lainnya.

Dalam menjalin interaksi sosial dengan masyarakat pribumi khususnya mereka yang menjadi pejabat/pemimpin non formal media pertemuan pun mereka rancang sedemikian rupa sehingga dapat menunjang upaya pencapaian tujuan mereka. Media tatap muka secara langsung masih dianggap sebagai media yang paling efektif. Akan tetapi selain dengan cara bertemu secara langsung mereka juga mengupayakan cara-cara lain seperti tampak pada tabel berikut ini:

Tabel 5. Media Hubungan dan Interaksi yang Digunakan Responden Selain Tatap Muka

No	Media yang digunakan responden	Frekuensi	%
1	Melalui penghubung atau kurir	21	32,31
2	Melalui telpon	38	58,46
3	Melalui surat menyurat	6	9,23
	Jumlah	65	100,00

Sumber: Data lapangan

Berdasarkan tabel di atas terlihat bahwa 58,46% responden menyatakan hubungan yang dilakukan dengan cara melalui telpon. Cara ini dianggap praktis dan secara langsung dapat membicarakan alasan dan inti permasalahan, tujuan dan kompensasinya antara mereka. Selain alasan murah, telepon juga dapat menghemat waktu pertemuan dan menjaga kerahasiaan pembicaraan. Sedangkan 32,31% melalui mediator atau penghubung berupa utusan atau kurir. Cara ini dipakai untuk menghilangkan rasa sungkan responden dan untuk memahami kesibukan masing-masing pihak. Dan sisanya 9,23% akan menggunakan surat-menyurat terutama bila menyangkut referensi, rekomendasi, akta perjanjian atau akta kerjasama yang didasari oleh kesepakatan kepentingan kedua belah pihak.

Media yang dipergunakan oleh responden juga sangat pribadi dan tidak semua orang dapat melakukannya. Artinya interaksi yang mereka bangun cenderung tertutup. Hal ini tidak terlepas dari tujuan yang mereka kembangkan. Sebagaimana dikemukakan sebelumnya, masyarakat pribumi khususnya pejabat atau pimpinan formal cenderung segan bila membicarakan bisnis secara terbuka. Apalagi pejabat formal dikenai peraturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No. 30 Tahun 1980 yang menjelaskan bahwa mereka tidak dapat melakukan dan terlibat bisnis secara langsung.

#### **Asimilasi Masyarakat Keturunan Tionghoa dengan Masyarakat Pribumi**

Sebagai sebuah proses sosial asimilasi merupakan proses yang tegas karena menuntut ketiadaan jati diri asal atau ciri yang khas kelompok etnis. Proses tersebut dapat bersifat sangat kompleks dan mencakup berbagai aspek kehidupan. Milton Gordon membagi konsep tersebut kedalam beberapa pemilahan diantaranya asimilasi kebudayaan, asimilasi struktural, asimilasi perkawinan, asimilasi sikap, asimilasi identifikasi, asimilasi perilaku dan asimilasi civic. Kesemua bagian tersebut pada akhirnya merujuk pada adanya penyatugabungan dari setiap individu yang terlibat, baik itu dari pihak masyarakat

keturunan Tionghoa maupun dari pihak masyarakat pribumi dan lebih rinci akan dijabarkan dalam kajian sebagai berikut:

### 1. Asimilasi Kebudayaan

Asimilasi kebudayaan merupakan bagian yang pertama dikemukakan dari bagian asimilasi dan dititikberatkan pada nilai-nilai atau norma-norma yang biasa dipatuhi bersama-sama oleh mereka untuk menjalaninya. Dalam mengukur proses tersebut kepada responden ditanyakan mengenai pemakaian bahasa yang paling sering dipergunakan sehari-hari sebagai cerminan dari nilai-nilai pergaulan yang mereka miliki. Sebelumnya dalam diri responden sebagai warga masyarakat keturunan Tionghoa terdapat nilai yang menempatkan bahasa Tionghoa sebagai bahasa yang paling baik untuk dipergunakan sehari-hari. Dalam kelanjutannya interaksi yang terjadi antara mereka dengan masyarakat pribumi menuntut pergeseran anggapan terhadap anggapan tadi. Asimilasi kebudayaan yang seutuhnya akan menciptakan anggapan atau nilai yang baru bahwa bahasa Tionghoa sudah tidak layak dipergunakan dalam pergaulan sehari-hari di Indonesia. Untuk lebih jelasnya tabel berikut akan memberikan gambaran mengenai pemakaian bahasa Tionghoa dalam kehidupan sehari-hari.

Tabel 6. Bahasa yang Dipergunakan dalam Berkomunikasi Sehari-Hari antara Anggota Keluarga, Sesama Etnis dan dengan Masyarakat Pribumi

Jenis Bahasa	Digunakan ketika berhubungan dengan:					
	Anggota keluarga		Sesama msy. Tionghoa		Masyarakat Pribumi	
	F	%	F	%	F	%
Bahasa Indonesia	47	72,31	23	35,38	63	96,92
Bahasa Tionghoa	18	27,69	42	64,62	0	0,00
Bahasa Daerah (Jawa)	0	0,00	0	0,00	2	3,08
Jumlah	100	100,00	100	100,00	100	100,00

Sumber: Data Lapangan

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa dalam lingkungan keluarga, terdapat 47 atau sekitar 72,31% responden yang telah menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa komunikasi, dan sisanya 27,69% masih menggunakan bahasa leluhur sebagai bahasa komunikasi sehari-hari. Fakta ini menunjukkan bahwa bahasa Indonesia telah diterima mejadi bahasa persatuan dan bahasa nasional.

Sedangkan apabila berhubungan dengan sesama masyarakat Tionghoa sebanyak 64,62% responden masih menggunakan bahasa leluhurnya

(Tionghoa/mandarin) sebagai bahasa komunikasi utama, dan hanya sebagian kecil saja (35,38%) yang menggunakan bahasa Indonesia.

Sementara itu ketika berhubungan dengan masyarakat pribumi, sebagian besar responden yaitu sebanyak 96,92% menggunakan bahasa Indonesia dan bahkan ada sebagian kecil responden (3,08%) justru menggunakan bahasa daerah khususnya bahasa Jawa. Hal ini disebabkan responden pernah tinggal di Jawa dalam jangka waktu yang lama khususnya di Jawa Tengah.

Bertolak dari sebaran data pada tabel di atas, menunjukkan bahwa asimilasi kebudayaan khususnya mengenai penggunaan bahasa Indonesia dari para responden sudah cukup baik. Hal ini tampak dari banyaknya responden yang menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasi utama dalam lingkup keluarga mereka. Hal tersebut disebabkan oleh efektivitas berbahasa Indonesia cukup besar dalam menunjang tujuan hidup mereka, terutama untuk berhubungan dengan masyarakat pribumi. Selain itu sosialisasi penggunaan bahasa Tionghoa (mandarin) sudah semakin kurang dilakukan dalam lingkungan masyarakat mereka. Sebaliknya intensitas penggunaan bahasa Indonesia yang mereka terima sehari-hari terutama dari lembaga-lembaga resmi seperti sekolah, kursus atau yang sejenisnya dan media massa juga turut menentukan pilihan mereka akan bahasa Indonesia dalam aktivitas komunikasi yang dijalani.

Selain diamati dari sisi berbahasa, asimilasi kebudayaan juga dikaji melalui penggunaan adat istiadat Tionghoa dalam upacara ritual mereka. Sifat upacara ritual berdasarkan adat istiadat sangatlah khas dan pelaksanaannya bisa sangat mencolok dalam masyarakat yang berbeda secara mayoritas adat istiadatnya. Tabel di bawah ini memperlihatkan kebiasaan responden dalam melakukan upacara ritual sesuai dengan adat istiadatnya dalam lingkungan masyarakat yang mereka huni.

Tabel 7. Tanggapan Responden dalam Melakukan Upacara Ritual Berdasarkan Adat Istiadat Masyarakat Tionghoa

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	%
1	Selalu melakukan	43	66,15
2	Kadang-kadang	15	23,54
3	Tidak pernah	7	10,78
	Jumlah	65	100,00

Sumber: Data lapangan

Berdasarkan data pada tabel di atas terlihat bahwa 66,15% responden menyatakan selalu menggunakan adat istiadat Tionghoa dalam melakukan aktifitas dalam bidang keagamaan, kelahiran ataupun kematian. Responden menyatakan bahwa mereka melakukan hal itu karena sudah merupakan tradisi sekaligus untuk melestarikannya. Sedangkan 23,54% responden menyatakan kadang-kadang saja melakukan hal tersebut dengan alasan terlalu sibuk dan memerlukan biaya yang tinggi. Sisanya 10,78% responden menyatakan tidak pernah melakukannya lagi dikarenakan kepercayaan yang dianut sekarang tidak mengajarkan hal itu lagi.

Kecenderungan di atas menunjukkan bahwa para responden umumnya masih mempertahankan nilai-nilai adat istiadat mereka yang ditunjukkan dalam pelaksanaan upacara ritual, dimiliki atau masih digunakannya benda/alat yang menjadi simbolik khas tanah leluhur seperti adanya cermin di dalam rumah dan sio bakar terutama jika ada kematian atau kelahiran anak. Gejala tersebut menjelaskan kekhasan yang melekat dalam upacara ritual masih mereka pertahankan dan sifatnya sangat berbeda dengan acara-acara ritual yang dimiliki oleh masyarakat pribumi.

Dalam kaitannya dengan asimilasi kebudayaan, kondisi seperti di atas, akan menyulitkan terlaksananya proses yang dimaksud. Masih tegasnya perbedaan antara masyarakat pribumi dengan masyarakat keturunan Tionghoa melalui kegiatan upacara ritual atau barang-barang khas simbolik yang oleh masyarakat pribumi tidak diketahui dengan jelas maknanya akan membuat individu dari setiap kelompok tersebut merasa terasing satu sama lain.

Kekhawatiran yang mungkin muncul dari keterasingan seperti itu adalah benturan terhadap adanya kesalahpahaman, kesenjangan informasi atau ketidakmengertiannya akan sesuatu hal di luar komunitasnya, yang pada gilirannya akan menciptakan potensi konflik.

## **2. Asimilasi Struktural**

Kajian asimilasi selanjutnya ditinjau dari segi asimilasi struktural yang memandang pembauran responden dalam lembaga sosial secara aktif. Lembaga sosial diterjemahkan sebagai sebuah struktur masyarakat yang ada dalam lingkungan responden baik yang formal maupun informal. Asimilasi struktural

akan dikatakan baik apabila responden sudah dapat merasakan dirinya sebagai bagian yang utuh dan menyeluruh dan mau terlibat aktif dalam salah satu organisasi kemasyarakatan. Untuk mengetahui perilaku asimilasi struktural masyarakat keturunan Tionghoa, tabel berikut akan memperlihatkan keterlibatan responden dalam menjabat kepengurusan dalam lembaga-lembaga sosial kemasyarakatan.

Tabel 8. Keterlibatan Responden menjadi Pengurus dalam Organisasi Kemasyarakatan

No	Keterlibatan Responden	Frekuensi	%
1	Pernah	5	7,69
2	Tidak pernah	60	92,31
Jumlah		65	100,00

Sumber: Data lapangan

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa 92,31% responden menyatakan tidak pernah terlibat dan mengikuti dalam kegiatan dan kepengurusan salah satu organisasi kemasyarakatan dan hanya sebagian kecil saja yang menyatakan pernah terlibat, namun itupun tidak terlalu aktif bahkan hanya sekedar partisipasi saja.

Dengan demikian terlihat bahwa asimilasi struktural yang dilakukan oleh responden masih sangat kurang dapat berjalan. Kondisi ini dapat ditunjukkan melalui rendahnya keterlibatan responden dalam kegiatan kemasyarakatan seperti posyandu, karang taruna, organisasi kepemudaan dan lain-lain yang bersifat non profit atau tidak mendapatkan keuntungan secara materi. Apalagi bagi responden yang dalam kesehariannya sangat sibuk dalam kegiatan bisnis. Hal ini menjadi salah satu sebab yang memberatkan mereka untuk mengikuti kegiatan-kegiatan tersebut.

### 3. Asimilasi Perkawinan

Bentuk asimilasi selanjutnya adalah asimilasi perkawinan yang berupa pendekatan secara fisik antara dua individu untuk membangun sebuah lembaga keluarga. Istilah lain dari proses tersebut adalah amalgamasi, proses tersebut menurut Soekanto (1990: 91) merupakan faktor yang paling menentukan bagi kelancaran proses asimilasi secara keseluruhan. Pernyataan tersebut disebabkan oleh karena dengan terbentuknya sebuah lembaga yang terdiri dari individu-individu yang berlainan budaya maka pembentukan nilai-nilai baru akan lebih

mudah, mengingat intensitas pergaulan dan komunikasi antara individu-individu tersebut relatif lebih tinggi. Tabel berikut menggambarkan tanggapan responden jika dirinya atau keluarga dekatnya menikah dengan masyarakat pribumi.

Tabel 9. Tanggapan Responden Mengenai Perkawinan Campuran dengan Masyarakat Pribumi

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	%
1	Setuju dilakukan	16	24,62
2	Tidak setuju	49	75,38
Jumlah		65	100,00

Sumber: Data lapangan

Sebaran data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa ternyata sebagian besar responden (75,38%) menyatakan tidak setuju terhadap perkawinan campuran antara masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat pribumi dan hanya sebagian kecil saja (24,62%) yang menyatakan setuju. Hal ini menunjukkan bahwa perkawinan campuran (amalgamasi) belum sepenuhnya dapat diterima oleh responden, yang disebabkan oleh pandangan tentang makna sebuah perkawinan itu sendiri. Responden atau mungkin juga masyarakat pribumi pada umumnya memandang perkawinan tidak hanya merupakan penyatuan dua orang individu saja, akan tetapi lebih jauh lagi perkawinan dipandang sebagai penyatuan dua keluarga yang diwakili oleh dua orang individu untuk menikah. Artinya perkawinan menurut responden melibatkan banyak orang, sehingga perbedaan-perbedaan yang bisa menghalangi proses penyatuan keluarga yang terlibat harus diminimalisasikan. Dengan demikian, adanya saling pengertian terhadap perbedaan-perbedaan dari dua orang yang hendak menikah saja dianggap tidak akan cukup untuk membangun sebuah keluarga.

#### 4. Asimilasi Sikap

Dalam mendefinisikan nilai-nilainya sendiri ataupun nilai-nilai masyarakat lain, sikap yang menunjang asimilasi akan menunjukkan objektivitas yang tinggi. Tidak akan ada keberpihakan terhadap salah satu nilai tertentu. Tujuan yang paling diutamakan dalam hal ini adalah terciptanya nilai-nilai baru yang dapat diterima oleh semua pihak. Berkaitan dengan pernyataan tersebut kepada responden ditanyakan sikap mereka apabila adat istiadat leluhur mereka dilebur ke dalam kebudayaan nasional, akan dijelaskan pada tabel berikut:



Tabel 10. Tanggapan Responden Terhadap Peleburan Budaya Dan Adat Istiadat Tionghoa Ke Dalam Kebudayaan Nasional

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	%
1	Setuju	19	29,23
2	Tidak setuju	46	70,77
	Jumlah	65	100,00

Sumber: Data lapangan

Data tabel di atas memperlihatkan bahwa sebagian besar responden menyatakan ketidaksetujuannya terhadap peleburan budaya leluhurnya ke dalam kebudayaan nasional. Hal ini menunjukkan bahwa sikap responden umumnya kurang mendukung terhadap terciptanya asimilasi dengan menolak peleburan/akulturasi adat istiadat leluhurnya ke dalam kebudayaan nasional. Sikap responden tersebut, cenderung menginginkan kondisi yang mereka rasakan sekarang terus dapat berjalan. Hal tersebut disebabkan mereka bisa banyak mengambil keuntungan dari kondisi sekarang ini, serta mereka juga tidak menginginkan resiko yang mungkin diperoleh dengan adanya peleburan adat istiadat Tionghoa ke dalam kebudayaan nasional. Selain itu kurang pemahannya terhadap makna kebudayaan nasional itu sendiri turut pula menentukan pilihan mereka untuk tetap mempertahankan adat istiadatnya sekarang, dan menganggap peleburan adat istiadatnya merupakan hal yang sulit untuk dilakukan.

### 5. Asimilasi Identifikasi

Proses asimilasi yang lainnya adalah berupa proses asimilasi identifikasi, proses ini ditandai dengan cara pandang responden tentang identifikasi dirinya sebagai seorang individu dan juga merupakan bagian dari masyarakat. Asimilasi identifikasi yang berjalan baik akan memperlihatkan individu atau kelompok yang bersangkutan mengidentifikasikan dirinya sebagai warga negara seutuhnya, dan bukan sebagai bagian dari kelompok masyarakat kecil di dalamnya.

Nama diri dianggap merupakan ciri yang paling mendasar dalam menilai asimilasi identifikasi seorang responden. Pilihan responden untuk memakai nama diri dengan menggunakan nama versi Indonesia atau versi Tionghoa, yang lebih dominan dalam kehidupan sehari-hari menjadi lebih relevan untuk dikaji sebagai ukuran dalam menilai pelaksanaan asimilasi identifikasi yang sedang berjalan. Tabel berikut akan menampilkan sebaran data mengenai penggunaan nama panggilan yang lebih dominan tersebut.

Tabel 11. Tanggapan Responden Terhadap Nama Panggilan yang Lebih Dominan Dipakai

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	%
1	Versi nama Indonesia	25	38,46
2	Versi nama Tionghoa	40	61,54
	Jumlah	65	100,00

Sumber: Data lapangan

Berdasarkan data tabel di atas terlihat bahwa sebagian besar responden (61,54%) menyatakan lebih banyak menggunakan nama panggilan versi Tionghoa sebagai panggilan sehari-hari, dan hanya sebagian kecil saja (38,46%) yang menggunakan nama versi Indonesia.

Dengan demikian maka nama versi Tionghoa ternyata lebih sering digunakan dalam pergaulan sehari-hari dibandingkan nama versi Indonesia. Menurut responden, mereka merasa memiliki identitas diri yang lebih kuat dengan digunakannya nama versi Tionghoa yang disandangnya ketika berhubungan, baik dengan masyarakat pribumi ataupun dengan sesama keturunan Tionghoa. Identifikasi diri sebagai warga negara Indonesia seutuhnya dari responden juga diperlihatkan melalui tanggapan mereka jika ditunjuk untuk memasuki wajib militer oleh negara. Tanggapan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa seorang individu yang merasa seutuhnya telah menjadi warga suatu negara, tentunya akan bersedia membela negaranya tersebut termasuk dengan mengikuti wajib militer, terutama apabila negara yang bersangkutan dalam keadaan perang. Tabel berikut akan memperlihatkan tanggapan responden atas diharuskan untuk mengikuti wajib militer dalam suasana yang genting.

Tabel 12. Tanggapan Responden Terhadap Kebijakan Wajib Militer

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	%
1	Setuju	25	38,46
2	Tidak setuju	40	61,54
	Jumlah	65	100,00

Sumber: Data lapangan

Dari sebaran data di atas terlihat bahwa umumnya responden tidak setuju untuk mengikuti wajib militer meskipun negara benar-benar membutuhkannya, dan hanya sebagian kecil saja yang menyatakan setuju sebagai wujud dari bela negara. Banyaknya responden yang menyatakan tidak setuju, alasannya karena

menurutnya mereka tidak cocok dalam bidang militer. Hal ini menunjukkan bahwa mereka sebagai warga negara Indonesia kurang menghayati sepenuhnya, dan mereka lebih merasa dirinya sebagai orang yang melakukan aktivitas sehari-hari di sebuah negara yang bernama Indonesia.

## 6. Asimilasi Perilaku

Aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh responden dalam penelitian ini diinventasikan untuk kemudian ditanamkan apakah dalam kegiatan tersebut responden selalu memberikan perhatian yang lebih, memprioritaskan atau memberi keringanan terhadap masyarakat sesama keturunan Tionghoa dibandingkan dengan masyarakat pribumi. Tabel berikut memberikan gambaran variasi jawaban responden tersebut.

Tabel 13. Tanggapan Responden Mengenai Pemberian Perhatian yang Lebih atau Memprioritaskan Masyarakat Keturunan Tionghoa

No	Klasifikasi aktivitas	Variasi jawaban responden							
		Ya		Kadang		Tidak		Jumlah	
		F	%	F	%	F	%	F	%
1	Jual beli	29	44,61	34	52,51	2	3,08	65	100,00
2	Menerima pegawai	30	90,91	3	9,09	0	0,00	33	100,00
3	Melamar kerja	25	100,00	0	0,00	0	0,00	25	100,00
4	Memilih teman kerja	49	84,48	9	15,52	0	0,00	58	100,00
5	Mengundang resepsi	26	4 0,00	34	52,31	5	7,69	65	100,00
6	Memilih teman bicara dalam sebuah kerumunan	37	56,92	25	38,46	3	4,62	65	100,00

Sumber: Data lapangan

Dari sebaran data pada tabel di atas, terlihat bahwa seluruh responden menyatakan melakukan aktivitas jual beli dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam melakukan aktivitasnya tersebut, 44,61% responden menyatakan selalu memberikan keringanan, baik dalam *discount* jumlah, harga maupun dalam proses khususnya kepada konsumen sesama keturunan Tionghoa. Sedangkan 52,51% responden menyatakan kadang-kadang saja memberikan keringanan dan sisanya sebanyak 3,08% menyatakan tidak pernah memberikan keringanan-keringanan tertentu.

Selanjutnya tercatat hanya terdapat 33 responden yang menyatakan pernah melakukan aktifitas penerimaan pegawai dalam lembaga bisnis yang dipimpinnya. Dari jumlah tersebut 90,91% responden menyatakan selalu memberikan prioritas

terhadap kalangan sendiri, sedangkan sisanya 9,09% responden menyatakan kadang-kadang saja memberikan prioritas tergantung dengan kemauan dan sumber daya manusianya.

Sedangkan 25 orang responden yang tercatat pernah melakukan aktifitas melamar pekerjaan, seluruhnya menyatakan selalu memberikan perhatian lebih terhadap perusahaan yang dimiliki atau dipimpin oleh orang-orang sesama keturunan Tionghoa untuk dijadikan sasaran dalam mengajukan lamaran kerja.

Dalam kaitannya dengan pemilihan teman kerja, sebanyak 84,48% responden dari sejumlah 58 responden yang pernah beraktivitas memilih teman kerja, menyatakan bahwa mereka selalu memprioritaskan orang sesama keturunan Tionghoa menjadi teman kerjanya dan sisanya hanya sekitar 15,52% yang menyatakan kadang-kadang saja memprioritaskan hal tersebut. Sementara itu, dalam hal memenuhi undangan resepsi terdapat sekitar 40,00% responden yang selalu memprioritaskan sesama masyarakat keturunan Tionghoa, dan sisanya 52,31% hanya kadang-kadang saja memprioritaskannya, serta 7,67% justru tidak pernah membeda-bedakannya sama sekali antara sesama keturunan Tionghoa dengan masyarakat pribumi.

Sedangkan pada saat responden memilih teman bicara dalam sebuah kerumunan, sebanyak 56,92% responden menyatakan selalu memilih teman bicara yang berasal dari masyarakat keturunan Tionghoa. Selebihnya 38,46% responden menyatakan hanya kadang-kadang saja melakukannya dan sisanya 4,62% responden menyatakan tidak pernah memilih teman bicara, artinya dia akan mengajak bicara siapa saja tanpa menilai asal usul atau etnisnya.

Berdasarkan variasi jawaban responden sebagaimana terpapar pada tabel di atas, memperlihatkan bahwa perilaku responden cenderung menempatkan masyarakat sesama keturunan Tionghoa pada tingkat pergaulan yang lebih tinggi dibandingkan dengan masyarakat pribumi. Hal ini disebabkan komunikasi yang terjalin diantara sesama keturunan Tionghoa dirasakan sangat efektif dan menyenangkan.

Menurutnya mereka tidak merasakan adanya kekhawatiran atau perasaan tidak sepadan seperti halnya ketika berhubungan dengan masyarakat pribumi. Selain itu pemahaman responden mengenai tindakan yang dilakukannya sangat

jelas yaitu dengan lebih menjalin keakraban dengan masyarakat sesama keturunan Tionghoa, mereka bisa memenuhi kebutuhan akan rasa aman dan kebutuhan sosial lainnya yang akan sulit didapatkan jika berinteraksi dengan masyarakat pribumi.

## 7. Asimilasi Civic

Pada akhirnya asimilasi akan menunjuk pada gagasan dan keinginan mengenai sesuatu yang berhubungan dengan kekuasaan, kewenangan dan pemerintahan dalam masyarakat, proses tersebut akan disebut sebagai asimilasi civic. Pada tingkat itu setiap individu dalam suatu masyarakat dinyatakan berhak atas tugas kepemimpinan atau kekuasaan yang mengatur masyarakat di lingkungannya. Dalam penelitian ini kajian mengenai asimilasi civic ditekankan pada tanggapan responden terhadap tugas kepemimpinan dalam masyarakat disekitarnya. Tabel berikut memperlihatkan tanggapan responden apabila dirinya atau orang lain sesama keturunan Tionghoa dipilih untuk memimpin lembaga struktural pemerintahan.

Tabel 14. Tanggapan Responden Jika Dirinya atau Orang Lain Sesama Keturunan Tionghoa Memimpin Lembaga Struktural Pemerintahan

No	Tanggapan Responden	Frekuensi	%
1	Setuju	3	4,62
2	Tidak setuju	62	95,38
	Jumlah	65	100,00

Sumber: Data lapangan

Data pada tabel di atas memperlihatkan bahwa sebanyak 95,38% responden menyatakan tidak bersedia dan tidak mau apabila dirinya atau teman sesama keturunan Tionghoa diminta untuk memimpin lembaga struktural tertentu di pemerintahan, dan hanya sebagian kecil saja (4,62%) yang menyatakan bersedia apabila benar-benar diberi kepercayaan penuh untuk memimpin lembaga yang dimaksud.

Dengan demikian tampak bahwa umumnya responden enggan terlibat dalam lembaga struktural pemerintahan dan tidak tertarik terhadap masalah-masalah pemerintahan dan kekuasaan dalam masyarakat sekitarnya. Kecenderungan tersebut tidak terlepas dari ketiadaan pengalaman responden untuk terlibat dan mengamati individu sesama keturunan Tionghoa yang terlibat dalam kegiatan politik atau kekuasaan. Selain itu dalam diri responden tercipta

pemahaman bahwa masalah politik dan kekuasaan merupakan masalah yang harus dihindari karena hal itu bukan bidang mereka. Dalam kondisi sekarang ini responden sudah merasa cukup puas jika dapat mengenal dengan baik para pemimpin dan pemegang kekuasaan untuk bisa dijadikan kolega yang menguntungkan. Sedangkan apabila mereka aktif terlibat secara langsung dengan masalah tersebut pemahaman mereka mengatakan itu artinya perubahan, dan karenanya harus dihindari karena dapat disertai dengan permasalahan-permasalahan yang pada akhirnya dapat merugikan dirinya.

Hal yang perlu diperhatikan dari situasi tersebut adalah bahwa asimilasi tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya, karena akan menimbulkan perasaan tidak puas dan dapat menimbulkan penyimpangan dari proses keutuhan masyarakat secara alami, yang pada akhirnya justru bisa merusak proses integrasi yang sedang berjalan. Pada dasarnya responden relatif mendukung terhadap pelaksanaan proses integrasi di dalam masyarakat. Hal tersebut terlihat dari keengganan mereka untuk terlibat secara langsung dalam konflik-konflik sosial yang terjadi. Terutama konflik mengenai nilai-nilai budaya yang menurut mereka akan dapat ditemukan dalam hubungan perkawinan campuran serta keterlibatan dalam organisasi kemasyarakatan atau organisasi politik. Selain itu mereka juga sedikit banyak menghindari penyimpangan aturan-aturan yang melingkupi mereka sebagai warga negara Indonesia, terutama dilihat dari pemilikan nama versi Indonesia serta ketidaktertarikan mereka dalam bidang struktural pemerintahan. Akan tetapi pelaksanaan integrasi tersebut cenderung mereka inginkan tanpa menghilangkan perbedaan-perbedaan yang dimilikinya. Hal tersebut tidak terlepas dari rasa aman yang mereka peroleh dengan memiliki profil integritas diri dan nilai-nilai yang mereka anut selama ini, hanya saja perlu diakui bahwa integrasi yang seperti itu tetap berpotensi konflik.

## **SIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian ini dapat diambil simpulan bahwa masyarakat keturunan Tionghoa dalam melakukan interaksi atau hubungan sosial dengan masyarakat pribumi cenderung lebih selektif dalam memilih siapa, dengan cara apa mereka akan berhubungan dan bagaimana hasil keuntungan yang hendak dicapai sebagai bahan pertimbangan. Dalam berhubungan dengan masyarakat

pribumi sehari-hari sangat dirasakan interaksi yang dijalankan kurang dapat tercipta dengan baik, mengingat intensitas interaksi yang dilakukan responden termasuk relatif jarang. Kesibukan masing-masing pihak terutama responden dalam menekuni usahanya, bentuk tempat tinggal berupa ruko yang cenderung terpusat, menjadi salah satu sebab jaranginya pertemuan tatap muka secara langsung.

Intensitas interaksi antara masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat pribumi diketahui masih relatif dangkal, sehingga proses integrasi tidak dapat berjalan dengan sempurna yang pada gilirannya pemahaman dan kemampuan mengambil atau memainkan peranan dari masing-masing kelompok etnis tersebut secara efektif menjadi kurang memadai. Kondisi ini ditandai dengan masih terjadinya salah pengertian, rasa saling curiga dan jarak sosial antaretnis dalam kehidupan sehari-hari.

Asimilasi masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat pribumi secara keseluruhan dapat dikategorikan dalam taraf yang rendah. Kondisi ini menjadikan proses integrasi sulit untuk ditingkatkan kualitasnya sampai pada taraf penyatugabungan. Tingginya pilihan responden untuk tetap menggunakan bahasa Tionghoa dalam berkomunikasi dengan sesama masyarakat Tionghoa, keengganan untuk terlibat secara aktif dalam berbagai organisasi kemasyarakatan, kurang setuju terhadap perkawinan campuran antara masyarakat keturunan Tionghoa dengan masyarakat pribumi dan lain sebagainya adalah contoh nyata dari adanya kendala dan kesulitan dalam rangka membentuk satu keutuhan yang harmonis diantara dua kelompok masyarakat tersebut.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- B. Taneko, Soleman. (1984). *Struktur dan Proses Sosial suatu Pengantar Sosiologi Pembangunan*. Jakarta: CV. Rajawali.
- Syani, Abdul. (1987). *Sosiologi Kelompok dan Masalah Sosial*. Jakarta: Fajar Agung
- Susanto, Astrid. (1985). *Pengantar Sosiologi dan Perubahan Sosial*. Jakarta: Bina Cipta.

Hidayat, Z.M. (1984). *Masyarakat dan Kebudayaan Cina di Indonesia*. Bandung: Tarsito.

Rahamat, Jalaludin. (1985). *Psikologi Komunikasi*. Bandung: Remaja Karya.

Koentjaraningrat. (1985). *Kebudayaan dan Mentalitas*. Jakarta: PT. Gramedia.

Nasikun. (1984). *Sistem Sosial Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers.

W.A. Gerungan. (1987). *Psikologi Sosial*. Jakarta: PT. Bina Aksara.